

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional mengupayakan untuk mencapai perkembangan perekonomian tinggi, kemudian menguatkan, menumbuhkan tingkat kehidupan dan kerukunan semua masyarakat (Syahputra, 2017). Salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perekonomian pada tingkat daerah karena berpengaruh terhadap keberhasilan suatu negara. Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya masih menjadi permasalahan. Permasalahan ini masih menjadi masalah utama yang kompleks, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Kemiskinan telah menjadi permasalahan krusial yang wajib mendapat perhatian serius dalam upaya suatu negara mengatasi berbagai masalah domestik. Menurut Handalani (2019), persoalan kemiskinan di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan telah berlangsung sejak lama. Munandar dkk. (2020) menegaskan bahwa tingkat kemiskinan dapat mencerminkan kualitas perekonomian suatu negara. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah, memikul peran krusial dalam mengatasi kemiskinan karena jika tidak ditangani, hal tersebut bisa menghambat kemajuan pembangunan nasional. Kondisi ini juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Aceh.

Aceh termasuk provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Secara nasional, posisi Aceh berada di urutan keenam setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 819 ribu jiwa. Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera (Sakinah, 2022). Kondisi tersebut menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan luas dalam merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan sesuai karakteristik wilayah, pemerintah daerah dituntut untuk memahami secara mendalam kebutuhan warganya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh guna menilai efektivitas kebijakan dalam menekan angka kemiskinan di daerah tersebut. Selama periode enam tahun, yakni 2019 hingga 2024, jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami dinamika dengan pola naik dan turun. Perubahan tersebut tersaji secara lebih rinci pada

Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Tingkat Kemiskinan(%)
2019	15.32
2020	14.99
2021	15.33
2022	14.64
2023	14.45
2024	14.23

Sumber: *BPS Provinsi Aceh (2024)*

Pada Tabel 1.1 di atas terdapat persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,45 % menjadi 14,23% tahun 2024. Meskipun demikian jumlah penduduk miskin masih tetap ada di provinsi Aceh. Kemiskinan yang terjadi karena masih banyak pengangguran yang belum memiliki pekerjaan dan sulit mendapatkan peluang kerja. Dalam mengatasi kemiskinan ini pemerintah perlu membuat rencana yang membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Pemicu terjadinya kemiskinan ini bisa terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya inflasi, tingkat pendidikan, dana otonomi khusus, dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Yuliasih (2018) mengungkap beberapa temuan utama. Pertama, di Kalimantan Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan korelasi positif dengan tingkat pengangguran, pengaruhnya tidak signifikan, Pendidikan ternyata memberikan pengaruh positif yang cukup berarti terhadap pengurangan pengangguran. Selanjutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan angka kemiskinan, pengaruhnya tidak begitu kuat secara statistik; di sisi lain, inflasi justru memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, namun pengaruh ini juga tidak signifikan. Sementara itu, pendidikan secara nyata berperan penting dalam menekan tingkat kemiskinan dengan kontribusi negatif yang signifikan. Terakhir, tingkat pengangguran terbukti secara signifikan meningkatkan kemiskinan di wilayah tersebut. Tingginya angka pengangguran semakin memperburuk kemiskinan, terutama saat inflasi turut meningkat. Rendahnya pendapatan akibat tidak bekerja membuat masyarakat kesulitan menutupi kebutuhan dasar karena harga-harga yang terus naik.

Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kemiskinan yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan, karena pendidikan yang rendah membatasi keterampilan dan pengetahuan, yang berpengaruh pada peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau layak. Pendidikan memberikan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan kemampuan intelektual, membangun karakter mulia, mengembangkan sikap positif, serta menguasai keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Mutu sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan menjadi faktor krusial dalam menciptakan generasi yang kompetitif, mampu berkolaborasi dengan baik, dan berperan aktif dalam mendorong kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Hal ini diperlukan agar setiap bangsa siap menghadapi tantangan persaingan global di masa mendatang (Edward & Azhar, 2019).

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas pandangan hidupnya. Selain itu, pendidikan berperan sebagai sarana pemberdayaan, di mana peserta didik tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga aktif terlibat dalam membentuk masa depan yang lebih baik (Anggraini, 2020). Mengingat pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor pendidikan mencakup jalur formal maupun nonformal. Pendidikan yang bermutu adalah yang mampu mencetak individu yang kompeten, memiliki wawasan luas, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika serta tuntutan zaman.

Keberhasilan penerapan program wajib belajar di tengah masyarakat tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi warganya. Pendidikan, selain berperan penting dalam memudahkan seseorang memperoleh pekerjaan terlebih karena banyak perusahaan menetapkan kualifikasi pendidikan yang tinggi bagi calon pegawainya juga menjadi salah satu cara untuk mencegah seseorang terjerumus dalam kemiskinan (Anggraini, 2020). Saat menghadapi pengangguran, kemampuan dan ilmu yang didapatkan dari pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk membuka usaha mandiri, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan mencegah jatuh ke dalam kemiskinan.

Adapun tingkat pendidikan di Provinsi Aceh berfluktasi selama 6 tahun terakhir dari 2019 hingga 2024, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1. 2
Tingkat Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Tingkat Pendidikan (%)
2019	9.18
2020	9.33
2021	9.37
2022	9.44
2023	9.55
2024	12.27

Sumber: *BPS Provinsi Aceh (2024)*

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase pendidikan terendah terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 9,18 persen, sementara persentase tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan angka 9,55 persen. Kajian yang dilakukan Anggraini (2020) menemukan bahwa pendidikan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh

koefisien regresi sebesar 0,021981, nilai t-statistik 0,052685, dan tingkat probabilitas 0,0428, yang berada di bawah batas signifikansi 5%, sehingga mendukung validitas hubungan tersebut secara statistik. Selain itu, upah minimum juga memberikan efek positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung, dengan koefisien 0,062153, t-statistik 0,204403, serta probabilitas 0,0398 (<5%). Hasil analisis yang menggabungkan kedua variabel tersebut mengungkapkan bahwa pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat berpengaruh terhadap dana otonomi khusus, karena daerah yang mengalami tingkat kemiskinan tinggi seringkali kesulitan untuk memaksimalkan potensi dana tersebut. Tujuan diberikannya dana otonomi khusus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan pembangunan di daerah tersebut. Meskipun dana otonomi khusus dapat meningkatkan pembangunan, pemanfaatannya yang kurang optimal atau tidak merata bisa membatasi dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Salah satu persoalan karena pengelolaan dana otonomi khusus yang ditujukan kepada daerah otonomi khusus minim pengawasan, selanjutnya penduduk secara pribadi secara garis besar belum mengerti eksistensi dana otonomi khusus serta tugasnya kemudian masalah itu tidak membuat berita luas pada penduduk (LIP, 2019).

Aceh adalah salah satu provinsi yang memperoleh status otonomi khusus (Sakinah, 2022). Melalui kebijakan ini, pemerintah Aceh mendapatkan alokasi dana khusus berupa pendapatan dan dana daerah, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang dialokasikan untuk mendanai berbagai program pembangunan. terutama yang terkait dengan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, dan pendanaan sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial (Sakinah, 2022). Selain itu, alokasi dana Otsus juga difokuskan untuk mendukung pelaksanaan hak-hak istimewa yang dimiliki Aceh melalui berbagai program pembangunan.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dialokasikan selama dua dekade, yaitu dari tahun 2008 hingga 2028, dengan besaran dana yang disesuaikan berdasarkan DAU (Taurina *et al.*, 2019). Pemberian otonomi daerah memungkinkan setiap wilayah untuk mengelola sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya secara mandiri guna mendorong kemajuan daerah masing-masing. Khusus untuk Aceh, otonomi khusus dianggap memiliki potensi besar dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, dengan catatan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif dan baik. Mengingat kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat, diharapkan mereka memiliki kapasitas yang lebih baik dalam memperoleh informasi secara akurat serta merespons permasalahan secara lebih cepat melalui peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya (Alfiady *et al.*, 2019).

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, yakni antara 2019 dan 2024, dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Detail perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1. 3
Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Dana Otonomi Khusus
2019	8.357.470.000.000
2020	7.555.280.000.000
2021	7.555.830.000.000
2022	7.560.000.000.000
2023	3.960.000.000.000
2024	10.321.392,824.000

Sumber: *DJPK Kemenkeu (2024)*

Pada Tabel 1.3 di atas dapat dilihat dana otonomi khusus di Provinsi Aceh setiap tahun mengalami fluktasi. Akan tetapi, penurunan realisasi terjadi pada tahun 2024 yaitu Rp10.321.392,824.000, dan kenaikan realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.357.470.000.000.

Menurut Sakinah (2022), dalam pandangan jangka panjang, zakat dan dana otonomi khusus terbukti memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, penurunan dalam distribusi kedua instrumen tersebut berpotensi meningkatkan kemiskinan, sedangkan peningkatan alokasinya dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan secara substansial. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak menunjukkan pengaruh yang berarti dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Pemerataan distribusi dana otonomi khusus diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara optimal, karena kebijakan yang

diterapkan akan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah dan membuka kesempatan ekonomi yang lebih efektif bagi masyarakat lokal.

Kuznets, sebagaimana dikutip oleh Alfredo (2021), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan sebuah negara dalam jangka panjang untuk memproduksi kebutuhan masyarakatnya, dengan memperhatikan kemajuan teknologi serta keselarasan dengan lembaga dan ideologi yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan karena kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui dorongan pada pertumbuhan tersebut, yang mencakup peningkatan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penyediaan perumahan bersubsidi, kualitas lingkungan, serta penguatan sektor pertanian. Oleh sebab itu, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kesejahteraan penduduknya cenderung ikut meningkat seiring perkembangan itu.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak bersifat inklusif dan tidak diiringi pemerataan distribusi pendapatan, kesenjangan ekonomi dapat semakin melebar sehingga kemiskinan tetap bertahan atau bahkan bertambah parah. Meskipun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya solusi untuk menghapus kemiskinan, keberadaannya sering kali menjadi faktor yang diperlukan. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan, tanpa adanya pemerataan distribusi pendapatan, upaya tersebut tidak akan efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur keberhasilan karena bertujuan meningkatkan kemampuan produksi suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh Wongdesmiwati dalam Fauza (2020), peningkatan kapasitas produksi memerlukan tambahan

tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat membantu menekan tingkat kemiskinan. Antara tahun 2019 hingga 2024, dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh ditandai oleh fluktuasi yang bersifat siklikal, dengan kecenderungan mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian sepanjang periode observasi

Adapun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh berfluktasi selama 6 tahun terakhir dari 2019 hingga 2024, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1. 4
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	4.14
2020	-0.37
2021	2.81
2022	4.21
2023	4.23
2024	4.6

Sumber: *BPS Provinsi Aceh (2024)*

Data pada Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa sepanjang periode 2019–2024, pertumbuhan ekonomi di Aceh bergerak secara fluktuatif. Pencapaian tertinggi dicatat pada tahun 2024, sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2020.

Dalam penelitiannya, Novianto (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi memiliki efek negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran justru meningkatkan tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil uji F menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut

secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk menangani masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap kemiskinan dan bagaimana keempat variabel tersebut bersama-sama dapat mempengaruhi kemiskinan di provinsi Aceh. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memutuskan untuk mengkaji permasalahan ini melalui penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Dana Otonomi Khusus, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka berikut ini disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat pendidikan berpengaruh secara Negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana dana otonomi khusus berpengaruh secara Negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara Negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui apakah dana otonomi khusus berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan yang bermanfaat bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian dengan variabel serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan menjadi sarana pembelajaran untuk memperluas ilmu pengetahuan sekaligus memberikan pemahaman mengenai tingkat pendidikan, dana otonomi khusus, dan pertumbuhan ekonomi, serta menguraikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pembaca dan memperkaya wawasan akademis dalam bidang terkait.